

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang selalu menjadi fokus utama di setiap negara di dunia baik negara maju maupun negara berkembang adalah permasalahan yang terkait dengan pendidikan. Permasalahan pendidikan di negara maju dan di negara berkembang sangatlah beragam. Dari berbagai permasalahan yang beragam tersebut beragam pula cara serta upaya yang dilakukan negara-negara tersebut untuk mengatasi permasalahan pendidikan di negaranya. Masalah-masalah yang umumnya dihadapi oleh tiap-tiap negara di dunia diantaranya adalah tidak meratanya akses pendidikan, mutu serta kualitas pendidikan yang buruk, tidak terlaksananya sistem *Education for All*, kualitas dan kuantitas guru profesional yang terbatas dan lain sebagainya. Namun, setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatasi setiap masalah pendidikan tersebut. Sebagian negara telah dapat mengatasi permasalahan pendidikannya dengan sistem pendidikan negaranya, namun banyak juga negara yang masih belum dapat mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut dengan sistem pendidikan negaranya.

Pendidikan merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat komponen yang saling berhubungan, saling menunjang dan saling mempengaruhi secara sinergis, hal ini dapat disebut sebagai sistem pendidikan. Semakin lengkap komponen/unsur dalam pendidikan, maka semakin tinggi kualitas serta fungsi dari masing-masing komponen

tersebut, serta makin tinggi intensitas kontribusi komponen/unsur terhadap totalitas sistem, maka tujuan sistem akan lebih mudah tercapai, serta hasilnya akan lebih berkualitas.¹ Di dunia terdapat beberapa negara yang memiliki sistem pendidikan lebih unggul dari negara-negara lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga penelitian bernama *The Social Progress Imperative*, negara Korea Selatan, Jepang, Singapura, Hongkong, Finlandia, Inggris, Kanada, Belanda, Irlandia, dan Polandia menduduki urutan 20 besar negara dengan sistem pendidikan dasar terbaik di dunia.² Sistem pendidikan di negara-negara tersebut telah diakui sebagai sistem pendidikan yang lebih baik dari negara-negara lainnya di dunia, hal ini dikarenakan komponen/unsur dalam sistem pendidikan yang digunakan oleh negara tersebut telah bersinergi dengan baik dalam mengatasi masalah pendidikan di negaranya serta dari segi hasil pendidikan juga sudah jauh lebih berkualitas bila dibandingkan dengan negara lainnya.

Menurut Hasbullah dalam buku yang berjudul *Kebijakan Pendidikan* terdapat beberapa permasalahan pendidikan yang sangat krusial diantaranya: (1) masalah ketidakseimbangan dan daya tampung; (2) masalah pemerataan pendidikan; (3) masalah mutu; (4) masalah kualitas dan kuantitas guru, (5) masalah pembiayaan pendidikan; dan (6) masalah relevansi pendidikan.³ Salah satu yang menjadi masalah

¹ E. Surachman, Devi Septiandini, 2016, *Pendekatan, Strategi, dan Model-model Pembelajaran*, (Jakarta:Labsos UNJ), hlm. 3

² Suci Wu, 2018, "10 Negara dengan Sistem Pendidikan Terbaik di Dunia", <https://idntimes.com>, 03 Februari 2018

³ H.M. Hasbullah, 2016, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 15-25

pendidikan adalah masalah pemerataan pendidikan, di dalam suatu negara tidak semua warga masyarakatnya dapat dengan mudah mendapatkan akses dalam pendidikan, terlebih lagi dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini pendidikan dikatakan tidak merata karena hanya masyarakat di daerah tertentu saja yang dapat menjangkau akses terhadap pendidikan, sedangkan sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau daerah-daerah pinggiran tidak mudah mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Di kawasan negara-negara ASEAN, dalam data terbaru 2018 dari lembaga penelitian *Social Progress Imperative* juga menunjukkan bahwa akses masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan berkualitas masih pada peringkat 97 dari 146 negara, sedangkan negara Singapura berada di peringkat 12 dari 146 negara.⁴ Pendidikan di Singapura unggul dibanding negara lainnya karena pendidikan di Singapura sangat mudah untuk diakses oleh berbagai kalangan masyarakat (ras, suku, etnis, status sosial ekonomi). Pemerintah memiliki kebijakan untuk keluarga yang tidak mampu membayar biaya pendidikan, dalam hal ini pemerintah menyediakan beasiswa untuk memastikan bahwa kemiskinan bukan hambatan untuk masyarakatnya mengenyam pendidikan.⁵ Dengan begitu walaupun biaya pendidikan di Singapura

⁴ Social Progress Imperative, 2018, "2018 Social Progress Index", diakses dari <https://www.socialprogress.org>, pada tanggal 2 Maret 2019.

⁵ Simon Saragih, 2019, "Pendidikan di Singapura, Ditata Seperti Sebuah Orkestra", diakses dari www.informatika.stei.itb.ac.id, pada tanggal 2 Maret 2019

relative mahal namun anak dari kalangan ekonomi kelas bawah yang tidak memiliki biaya pendidikan pun dapat mengakses pendidikan yang berkualitas.

Berbeda dengan kondisi di Singapura serta kondisi pendidikan negara-negara lainnya di dunia yang memiliki sistem pendidikan yang baik, Indonesia masih perlu untuk terus memperbaiki sistem pendidikan maupun akses pendidikan berkualitas. Di negara Indonesia, masih banyak tercatat kasus atau masalah pendidikan yang harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Masalah yang perlu diperhatikan salah satunya adalah dalam hal akses masyarakat terhadap pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan yang layak dan berkualitas ini sulit diakses oleh masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal di Indonesia.

Mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka dari itu kebanyakan anak Indonesia yang tidak mampu dalam hal ekonomi memutuskan untuk tidak bersekolah atau putus sekolah karena lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Di level SD pada tahun ajaran 2017/2018 tercatat 32 ribu anak yang putus sekolah. Di level SMP, jumlah siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya mencapai 51 ribu anak. Sedangkan untuk SMA dan SMK tercatat masing-masing 31 ribu dan 73 ribu anak.⁶ Faktor ekonomi yang rendah, sulitnya akses pendidikan, tidak adanya biaya untuk bersekolah, minimnya

⁶ Tim Publikasi Katadata, 2019 "#MudahkanHidup Anak Indonesia", diakses dari <https://katadata.co.id/infografik/2018/07/23/mudahkanhidup-anak-indonesia>, pada tanggal 3 Maret 2019

dukungan dari keluarga, masyarakat dan pemerintah menjadi faktor utama tingginya angka putus sekolah di Indonesia. Padahal sejatinya pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia.

Pendidikan juga seharusnya menjadi sarana pembentukan masyarakat yang berbudaya, cerdas, berkarakter, dan memiliki keterampilan lainnya. Menurut S. Nasution, pendidikan merupakan proses belajar dan mengajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat.⁷ Pola-pola kelakuan manusia yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah perilaku sopan santun, cerdas, berkarakter, berkepribadian baik dan lain sebagainya. Pola-pola kelakuan tersebut diinternalisasi melalui kegiatan pendidikan yaitu melalui sosialisasi sekunder oleh sekolah. Namun apabila anak-anak yang seharusnya masih melewati tahapan sosialisasi tersebut putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya terlebih pada usia dini akan mengakibatkan sosialisasi yang dilakukan tidak sempurna. Hal ini akan menimbulkan perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Perilaku anak atau remaja saat ini bisa dikatakan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, remaja mengalami degradasi moral. Berbagai berita yang terpampang di media cetak maupun media elektronik telah cukup membuktikan suatu bentuk degradasi moral bangsa Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun diiringi oleh kemajuan perkembangan zaman yang pesat. Dengan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja ini, maka dirasa perlu adanya

⁷ S. Nasution, 1994, *Pendekatan, Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara), hlm. 15

pendidikan berbasis karakter. Pendidikan berbasis karakter ini haruslah diterima oleh masyarakat sejak dini baik dari keluarga maupun sekolah.

Pendidikan yang dilakukan melalui sekolah dapat menjadi sarana dalam mengatasi masalah perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sekolah harus memfasilitasi segala bentuk usaha untuk mewujudkan pendidikan yang membentuk karakter dan perilaku yang baik dari peserta didik. Dalam hal ini setiap aspek dalam pendidikan harus dipenuhi oleh sekolah, salah satunya yang juga menjadi masalah dalam pendidikan, yaitu masalah kualitas dan kuantitas guru profesional yang minim. Hal ini menjadi masalah karena sejatinya komponen yang paling penting dalam menunjang pendidikan yang memiliki kualitas baik adalah guru yang berkualitas baik juga. Untuk mengatasi permasalahan minimnya kuantitas dan rendahnya kualitas guru ini diperlukan pelatihan atau pembinaan guru, sehingga guru yang tersebar di sekolah-sekolah pada nantinya menjadi guru yang menciptakan generasi-generasi yang berkualitas.

Pendidikan berbasis karakter atau Pendidikan Karakter diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan degradasi moral dan penurunan karakter bangsa pada remaja saat ini. Pendidikan Karakter penting untuk membentuk generasi bangsa yang berkualitas secara moral serta karakter. Penerapan pendidikan karakter di sekolah bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah degradasi moral yang dialami oleh generasi saat ini. Pendidikan karakter sudah banyak diterapkan di beberapa sekolah, namun rata-rata sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis

karakter ini merupakan sekolah swasta dengan biaya yang relative tinggi. Sehingga pendidikan berbasis karakter ini hanya dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat yang mampu atau kelas menengah atas. Sedangkan, sesungguhnya generasi yang berhak mendapatkan pendidikan berkualitas bukanlah hanya masyarakat pada golongan ekonomi atas saja melainkan juga masyarakat ekonomi bawah atau masyarakat miskin.

Pendidikan berkualitas ini merupakan hak semua masyarakat baik masyarakat di perkotaan atau di pedesaan, masyarakat dari ras, suku, agama apapun dan juga dari kelas sosial ekonomi atas maupun masyarakat kelas bawah. Pada hal ini khususnya anak dari kelas sosial ekonomi bawah dan masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal, anak dari kelas bawah kurang mendapatkan sosialisasi dan penanaman karakter baik dari agen sosialisasi utamanya yaitu keluarga dan ditambah juga dengan lingkungan masyarakat yang kurang mendukung penanaman karakter baik dari anak, hal ini menyebabkan karakter anak tidak terbentuk secara sempurna dan baik. Maka dari itu dibutuhkan pendidikan berkualitas yang dapat menjangkau masyarakat kelas bawah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Berbagai permasalahan pada remaja yang ada di Indonesia sekarang ini, pada tahun 2000 terbentuklah Indonesia Heritage Foundation (IHF) atau Yayasan Warisan Nilai Luhur Indonesia yang merupakan organisasi nirlaba/non profit yang didirikan oleh Dr. Ratna Megawangi dan Dr. Sofyan Djalil.⁸ Latar belakang terbentuknya IHF ini adalah berawal dari pertanyaan mengapa Indonesia yang mayoritas penduduknya

⁸ Diakses di <http://www.ihf.or.id/id/page/profil-IHF/> tanggal 21 Mei 2019 pukul 22:40 WIB

sudah mengerti pengetahuan tentang moral dan agama (misalnya menjadi kewajiban mata pelajaran Moral Pancasila dan Agama yang didapatkan pada setiap jenjang pendidikan) tetapi penerapan nilai moral Pancasila dan agama tersebut tidak tercermin pada perilaku kehidupan sehari-hari di masyarakat.⁹ Maka dari itu dibentuklah *Indonesia Heritage Foundation* (IHF) yang didalamnya terdapat berbagai program yang berfokus pada pendidikan karakter dengan model pembelajaran PHBK (Pendidikan Holistik Berbasis Karakter) yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat (masyarakat kota/desa, pegunungan/pantai, masyarakat daerah terpencil, kelas sosial ekonomi atas/menengah/bawah, dll). IHF membentuk berbagai program yang mendukung terlaksananya pendidikan karakter yang berkualitas secara keseluruhan. Program yang dibentuk oleh IHF diantaranya adalah Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (PHBK), Sekolah Karakter, Semai Benih Bangsa (SBB), Pelatihan Guru, serta program Parenting.¹⁰ Berbagai program yang dibentuk oleh IHF ini masing-masingnya memiliki tujuan yang berbeda-beda namun saling berkaitan dalam rangka menunjang pendidikan karakter yang berkualitas untuk anak bangsa.

Semai Benih Bangsa (SBB) merupakan salah satu program yang menarik karena program ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk dapat mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Program SBB ini berupa pendirian sekolah yang mengadopsi model PHBK (Pendidikan Holistik Berbasis Karakter) dalam

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Diakses di <http://www.ihf.or.id/id/page/program-IHF/> tanggal 21 Mei 2019 pukul 22:48 WIB

pelaksanaan PAUD/TK “Semai Benih Bangsa” atau pengadopsian Pendidikan Holistik Berbasis Karakter pada PAUD, TK, dan SD/Madrasah yang telah ada di daerah-daerah masyarakat miskin atau terpencil di Indonesia. Model PHBK ini merupakan model pendidikan berkualitas yang dibentuk oleh IHF. Dengan tersebarnya sekolah-sekolah SBB di daerah-daerah di Indonesia diharapkan dapat mengurangi masalah terkait akses pendidikan berkualitas yang kurang merata terutama di daerah masyarakat miskin. IHF sebagai organisasi yang melaksanakan program SBB ini juga turut memperhatikan komponen-komponen pendidikan berkualitas. Komponen yang menjadi fokus perhatian IHF terhadap pelaksanaan sekolah SBB ini salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan kepada guru yang merupakan komponen terpenting dalam pembentukan pendidikan berkualitas dengan bentuk program pelatihan guru. Dengan berbagai komponen yang memadai dan berkualitas sekolah-sekolah SBB yang dibentuk oleh IHF ini dapat memberikan akses kepada masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi melalui pendidikan karakter. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan melihat bagaimana peran serta *Indonesia Heritage Foundation* (IHF) dalam upaya pemerataan terhadap akses pendidikan berkualitas untuk kelas bawah atau masyarakat miskin.

I.2. Permasalahan Penelitian

Masalah karakter anak bangsa yang mengalami kemerosotan atau degradasi moral pada masa ini masih perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Permasalahan moral dan karakter yang semakin menjadi perhatian masyarakat

khususnya dalam pendidikan. Degradasi moral terjadi pada generasi anak usia sekolah, maka dari itu sekolah sebagai agen sosialisasi sekunder haruslah dapat mengatasi permasalahan ini pada peserta didiknya. Sekolah yang menjadi agen sosialisasi sekunder harus senantiasa menginternalisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini *Indonesia Heritage Foundation* (IHF) sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan menghadirkan berbagai program yang berfokus pada pembentukan karakter anak melalui program Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (PHBK) yang diterapkan oleh IHF. Selain itu untuk memenuhi keterjangkauan akses pendidikan karakter yang berkualitas pada daerah masyarakat miskin di perkotaan maupun di pedesaan, IHF juga menghadirkan program Semai Benih Bangsa (SBB). SBB ini diupayakan menjadi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas tinggi ditengah masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Serta terdapat pula berbagai program yang digagas oleh IHF ini berupa Sekolah Karakter, Semai Benih Bangsa, Pelatihan Guru Pendidikan Karakter, dan lain sebagainya sebagai usaha mensosialisasikan Pendidikan Karakter secara merata pada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah upaya pemerataan pendidikan karakter berkualitas bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, fokus penelitian ini yaitu pada pendidikan berkualitas untuk kelas bawah melalui program Semai Benih Bangsa (SBB) yang dilakukan oleh *Indonesia Heritage Foundation* (IHF). Permasalahan penelitian ini

akan dibatasi agar lebih terarah melalui pertanyaan-pertanyaan. Maka pertanyaan-pertanyaan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya IHF dalam usaha pemerataan akses pendidikan berkualitas untuk kelas bawah?
2. Apa faktor penghambat dan faktor pendukung IHF dalam pelaksanaan pendidikan berkualitas untuk kelas bawah?
3. Apa implikasi dari upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas untuk kelas bawah?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan lebih mendalam mengenai pendidikan berkualitas yang dilakukan oleh IHF untuk pemerataan pendidikan berkualitas untuk kelas bawah serta dapat menjawab pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya IHF dalam usaha pemerataan akses pendidikan berkualitas untuk kelas bawah.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat serta faktor pendukung pelaksanaan pendidikan berkualitas untuk kelas bawah.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis implikasi dari upaya pemerataan akses pendidikan untuk kelas bawah yang dilakukan oleh IHF.

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun dengan diterapkannya tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan juga dunia pendidikan. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran mengenai pendidikan berkualitas yang seharusnya didapatkan oleh semua kelas sosial ekonomi tanpa terkecuali dikaitkan dengan kasus dan masalah pendidikan yang masih sering kali terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat ekonomi kelas bawah. Selain itu, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan adanya gambaran mengenai pendidikan yang berkualitas dan peran serta organisasi dalam pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk ke dalam kajian Sosiologi Pendidikan.

Berbagai kasus yang terjadi di masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat kelas bawah mengharapkan pendidikan yang setara dengan yang didapatkan anak-anak pada umumnya, yaitu mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, serta kemudahan dalam mengakses pendidikan dengan biaya yang terjangkau. Dari segi praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan untuk peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai input untuk menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan berkualitas, terutama untuk masyarakat kelas bawah. Dengan demikian, adanya penelitian ini penulis harapkan dapat mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana pendidikan

berkualitas yang dilaksanakan oleh organisasi yang bergerak di bidang pendidikan ini dalam menerapkan pendidikan yang berkualitas pada masyarakat kelas bawah dengan adanya penelitian ini dapat memberikan input dan pemahaman yang baru untuk masyarakat. Adapun kegunaan dalam melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan memotivasi peneliti maupun pembaca dalam mempelajari kajian pendidikan berkualitas untuk kelas bawah.
2. Pada penelitian yang penulis hasilkan, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan khazanah ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi.
3. Sebagai wahana untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dalam suatu penelitian/karya ilmiah.

I.5. Tinjauan Penelitian Sejenis

Peneliti menggunakan beberapa bahan pustaka yang membantu proses penelitian yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian, yaitu tentang pendidikan untuk kelas bawah yang dilakukan oleh organisasi yang berfokus pada pendidikan terutama pendidikan karakter. Berikut adalah beberapa tinjauan pustaka yang diambil dari beberapa penelitian sebelumnya yang dapat membantu proses penelitian yang dilakukan.

Pertama, ditulis oleh Suyahman dalam Prosiding Seminar Nasional Pendidikan yang dipublikasikan pada tahun 2015 yang diberi judul Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan dan Kenyataan (Studi Kasus: Permasalahan Pendidikan di

Indonesia).¹¹ Tulisan Suyahman ini juga mendeskripsikan bagaimana Pendidikan Untuk Semua saat ini berdasarkan sumber-sumber buku serta artikel tentang *Education For All* yaitu dengan menjangkau semua kalangan baik tua-muda, miskin-kaya, dan seterusnya untuk dapat memperoleh Pendidikan dasar hingga Pendidikan tinggi.

Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana konsepsi pendidikan untuk semua dan karakteristiknya, melihat bagaimana kondisi pendidikan untuk semua, dan seperti apa kondisi pendidikan untuk semua yang diharapkan, serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan untuk semua. Dalam tulisan ini juga dimuat laporan dari UNESCO mengenai *Education For All* (EFA), dalam laporan dari UNESCO ini disebutkan kebijakan yang harus dilakukan oleh masyarakat internasional untuk mencapai tujuan dari *Education for All* itu sendiri, diantaranya adalah:

1. Pertama, meningkatkan keterjangkauan dan akses pendidikan dapat mengatasi kesenjangan pendidikan. (meringankan biaya sekolah, tunjangan atau subsidi untuk keluarga miskin, menyediakan buku dan seragam)
2. Kedua, meningkatkan kualitas serta mutu Pendidikan. (berbagai masalah putus sekolah atau kesulitan belajar yang dialami siswa dapat diatasi apabila fasilitas belajar memadai dan lebih banyak guru yang memenuhi syarat).

¹¹ Suyahman, 2015, Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, 21 November 2015, hlm. 274

Tulisan ini berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan karena adanya kesamaan konsep antara tulisan ini dan penelitian penulis. Tulisan ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada penulis dalam pelaksanaan *Education for All* atau Pendidikan untuk Semua. Penulis juga jadi lebih memahami lebih mendalam mengenai bagaimana seharusnya Pendidikan untuk Semua ini dijalankan agar tercapainya tujuan dengan baik.

Kedua, ditulis oleh Muhammad Idrus dalam Jurnal Psikopedagogia Vol.1 No.2 yang dipublikasikan pada tahun 2012 dengan judul *Mutu Pendidikan Dan Pemerataan Pendidikan Di Daerah (Quality Of Education And Regional Educational Equity)*.¹² Tulisan ini mendeskripsikan bahwa titik fokus utama dalam meningkatkan pendidikan, yaitu pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, relevansi pendidikan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Peningkatan yang dilakukan harusnya dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terfokus pada satu aspek kemudian mengabaikan aspek yang lainnya.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian Idrus ini adalah dimana evaluasi pendidikan yang dilakukan pada saat ini belum membawa peningkatan bagi kualitas pendidikan. Pada masalah pemerataan Pendidikan, terdapat beberapa persoalan terkait dengan pemerataan Pendidikan tersebut, diantaranya disebabkan oleh (1) Perbedaan tingkat social ekonomi masyarakat, (2) Perbedaan fasilitas Pendidikan, (3) Sebaran

¹² Muhammad Idrus, 2012, Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah, *Jurnal Psikopedagogia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm. 4

sekolah tidak merata, (4) Nilai masuk sebuah sekolah dengan standard tinggi, (5) Rayonisasi.¹³ Aspek ini akan dibahas juga pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, ditambah dengan peran organisasi pendidikan dalam mengatasi masalah tersebut.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Lukman Hakim dalam Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 yang ditulis pada Maret 2016 dengan judul *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.¹⁴ Dalam tulisan Lukman Hakim ini membahas mengenai permasalahan pembangunan pendidikan di Indonesia yang harus diperhatikan. Masalah yang harus menjadi perhatian diantaranya adalah masalah perluasan akses pendidikan dan masalah pemerataan pendidikan. Dimana semua hal yang menyangkut akses pendidikan dan pemerataan pendidikan ini diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam tulisan ini banyak dibahas mengenai dasar-dasar yang mengatur pemerataan pendidikan, akses pendidikan, dan kesamaan akses pendidikan yang seharusnya didapatkan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim ini berfokus pada pemerataan pendidikan yang berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sementara tulisan penulis berfokus pada organisasi yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 8

¹⁴ Lukman Hakim, 2016, *Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, *Jurnal EduTech*, Vol. 2, No.1, Maret 2016, hlm. 53-64

menerapkan pendidikan berkualitas yang merata dan terakses terutama bagi masyarakat ekonomi kelas bawah. Tulisan ini bermanfaat untuk penulis, karena dengan adanya tulisan ini penulis dapat mengetahui secara lebih mendalam apa yang telah diatur dalam undang-undang mengenai pemerataan pendidikan serta akses pendidikan.

Keempat, ditulis oleh Nurhaidah dan Insyah Musa dalam *Jurnal Pesona Dasar* Vol. 1 No. 4 yang dipublikasikan pada tahun 2015 dengan judul *Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas di Era Global Dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik Secara Maksimal*.¹⁵ Jurnal Nurhaidah dan M. Insyah Musa mendeskripsikan mengenai pelayanan pendidikan berkualitas yang dapat menjadi sarana pengembangan potensi peserta didik secara maksimal. Tulisan ini juga membahas mengenai peran guru yang seharusnya melakukan perubahan-perubahan inovatif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ideologi dalam pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk mengembangkan potensi peserta didik.¹⁶ Dalam penelitian ini dikatakan bahwa pelayanan dan peranan maksimal yang dilakukan oleh merupakan aspek yang sangat vital serta merupakan wadah yang sangat tepat untuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta harus menjadi prioritas secara optimal dan berkesinambungan.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai

¹⁵ Nurhaidah, 2015, *Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas di Era Global Dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik Secara Maksimal*, dalam *Jurnal Pesona Dasar*, Vol 1 No.4. Oktober 2015, hlm. 5

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 53

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian Nurhaidah ini adalah bagaimana pelayanan pendidikan yang berkualitas yang dapat mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal. Dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan tersebut harus dipusatkan kepada pembinaan kegiatan belajar dalam beberapa komponen pendukungnya, yaitu diantaranya profesionalisme guru, sarana dan prasarana belajar, manajemen pendidikan, penampilan dan fisik sekolah, serta partisipasi masyarakat.¹⁷ Tulisan Nurhaidah ini lebih fokus terhadap pelayanan pendidikan berkualitas di sekolah umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih berfokus pada pelayanan yang dilakukan oleh suatu organisasi yang menerapkan pendidikan berkualitas di sekolah terutama di sekolah yang siswanya berasal dari ekonomi kelas bawah.

Kelima, ditulis oleh Muhammad Hasan ini mengangkat masalah pendidikan yang banyak terlihat di daerah-daerah terpencil, yaitu masalah kesenjangan pendidikan antar daerah. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan di daerah tertinggal berdasarkan perspektif ideologi pendidikan. Dimana tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan pembangunan di daerah

¹⁷ *Ibid.*, hlm.57

tertinggal, serta upaya untuk mengatasinya berdasarkan perspektif ideologi-ideologi pendidikan¹⁸.

Tulisan yang ditulis oleh Muhammad Hasan ini memiliki kesamaan konsep dengan penulis sehingga tulisan ini bermanfaat sebagai acuan untuk penulis untuk memperdalam konsep *Education For All* yang akan dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun dalam tulisan Muhammad Hasan ini lebih berfokus pada penerapan *Education For All* pada masyarakat di daerah terpencil dan bagaimana pemerintah daerah atau pusat mengatasinya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana suatu organisasi yang ada di bidang pendidikan dapat menjangkau atau menerapkan pendidikan untuk semua yang berkualitas untuk semua kelas sosial.

Keenam, ditulis oleh Carolyn M. Shields dan Erica J tulisan ini dipublikasikan oleh *Teacher Development* Vol.12 No.4 pada November 2008. Tulisan ini dipublikasikan dengan judul *High-Quality Education for All Students: Putting Social Justice At Its Heart*.¹⁹ Tulisan ini membahas mengenai pendidikan berkualitas tinggi untuk semua orang, yaitu bagaimana setiap orang tanpa terkecuali mendapatkan pendidikan dengan kualitas tinggi.

Permasalahan penelitian yang muncul pada tulisan ini diantaranya adalah bagaimana sekolah dapat menghilangkan kesenjangan sosial dan menciptakan sekolah

¹⁸ Muhammad Hasan, 2018, Pendidikan Untuk Semua : Pembangunan dan Pendidikan Dalam Perspektif Ideologi-Ideologi Pendidikan, *Prosiding Seminar Nasional Administrasi Pendidikan dan Manajemen Pendidikan*, 21 April 2018, hlm. 12

¹⁹ Carolyn M. Shields dan Erica J, 2008, High-Quality Education for All Students: Putting Social Justice At Its Heart, *Teacher Development*, Vol. 12, No. 4, hlm. 289

menjadi tempat bermain yang merata bagi siswa serta juga bagaimana guru memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa untuk berhasil. Yang dapat penulis ambil dalam tulisan ini adalah mengenai pendidikan keadilan sosial yang harusnya diterapkan oleh para pendidik untuk para siswa yang kurang beruntung. Tulisan ini bermanfaat untuk penulis karena memuat konsep yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sehingga tulisan ini layak untuk menjadi referensi yang akan digunakan oleh penulis.

Ketujuh, jurnal ini ditulis oleh Donald Kerr ini merujuk pada pertanyaan bagaimana peran yayasan sosial dalam melakukan program pendidikan guru, sehingga menghasilkan guru dengan kualitas tinggi yang siap untuk membentuk pendidikan yang berkualitas. Tulisan ini memberikan alasan-alasan yang kuat untuk pernyataan bagi guru masa depan untuk terlibat dalam yayasan sosial. Penulis berpendapat bahwa yayasan sosial pendidikan harus membentuk komponen yang kuat dari program pendidikan guru berkualitas tinggi di Kanada.²⁰

Yayasan sosial berperan dalam program persiapan guru, namun peran yayasan semakin hari semakin berkurang. Padahal standar guru harus semakin tinggi seiring dengan standar siswa yang meninggi juga, standar guru harus tinggi dalam pengenalan yang mendalam terhadap praktik mereka; dalam pengetahuan, keterampilan dan disposisi yang kompleks, guru harus memahami dan menguasai; dan dalam hal

²⁰ Donald Kerr, 2011, The Role of the Social Foundations of Education in Programs of Teacher Preparation in Canada, *Canadian Journal Of Education* 34, 4: 118-134. hlm.120

pemahaman guru tentang praktik-praktik pendidikan.²¹ Penelitian ini bermanfaat untuk penulis karena menambah referensi penulis mengenai peran Yayasan dalam pelatihan guru untuk membentuk guru yang berkualitas sebagai fondasi pendidikan yang berkualitas.

Tabel I.1. Perbandingan Telaah Pustaka

NO	Peneliti	Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Suyahman	2015	PENDIDIKAN UNTUK SEMUA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan di Indonesia)	Menjelaskan tentang Pendidikan yang terakses untuk semua kalangan.	Fokusnya lebih luas yaitu pada tingkatan negara.
2.	Muhammad Idrus	2012	Mutu Pendidikan Dan Pemerataan Pendidikan Di Daerah (Quality Of Education And Regional Educational Equity)	Kesamaan konsep penelitian.	Lebih fokus terhadap kebijakan peningkatan mutu dengan sistem UN yang dipolitisasi.
3.	Lukman Hakim	2016	Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	Konsep Kesamaan Akses	Lebih berfokus pada kebijakan yang mengatur kesamaan akses pendidikan tersebut
4.	Nurhaidah dan M. Insya Musa	2015	Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas di Era Global Dalam Mengembangkan Potensi Peserta Didik Secara Maksimal	Kesamaan Konsep Penelitian	Lebih fokus terhadap pelayanan pendidikan berkualitas di sekolah umum.

²¹ *Ibid.*, hlm. 121

NO	Peneliti	Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Muhammad Hasan	2018	Pendidikan Untuk Semua : Pembangunan dan Pendidikan Dalam Perspektif Ideologi-Ideologi Pendidikan	Kesamaan Konsep Penelitian	Berfokus pada mengatasi permasalahan pembangunan di daerah tertinggal dengan perspektif ideologi pendidikan
6.	Carolyn M. Shields dan Erica J.	2008	High-Quality Education for All Students: Putting Social Justice At Its Heart	Membahas mengenai pendidikan untuk siswa yang kurang beruntung	Tidak terdapat konsep pendidikan berkualitas
7.	Donald Kerr, David Mandzuk, Helen Raptis	2011	The Role of the Social Foundations of Education in Programs of Teacher Preparation in Canada	Konsep pendidikan berkualitas	Fokusnya pada pendidikan guru

(Sumber : diolah dari tinjauan penelitian, 2019)

Tinjauan pustaka yang diambil untuk penelitian ini, peneliti dapat menggali informasi yang memiliki kesesuaian yang dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendidikan berkualitas untuk kelas bawah oleh IHf. Kelima tinjauan pustaka tersebut kemudian dapat membantu peneliti dalam membentuk pola pikir yang lebih sistematis serta peneliti juga mengambil beberapa konsep yang memiliki kesesuaian dalam penyusunan skripsi ini.

I.6. Kerangka Konseptual

I.6.1. Pendidikan Berkualitas

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara²². Pendidikan pada hakikatnya harus mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, mantap secara moral, kompetensi menguasai IPTEK, serta berkomitmen tinggi dalam berbagai peran sosial²³. Menurut ASCD dan Education International (EI), menyatakan bahwa pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang berfokus pada anak secara keseluruhan baik dari perkembangan sosial, emosional, mental, fisik dan kognitif siswa tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, status sosial dan ekonomi atau pun lokasi geografis. Selain itu pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mempersiapkan anak untuk kehidupannya, bukan hanya sebatas pada pengujian. Pendidikan berkualitas didukung oleh tiga pilar utama, yaitu²⁴: 1) Memastikan akses ke guru yang berkualitas.

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²³ H. M. Hasbullah, *KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), hlm. 5

²⁴ Diakses di www.huffpost.com/what-do-we-mean-by-a-quality-education/ diakses pada 12 Juni 2019 pukul 12.54

2) Menyediakan penggunaan alat pembelajaran yang berkualitas dan pengembangan profesional. 3) Pembentukan lingkungan belajar yang aman dan mendukung kualitas.

Pendidikan yang berkualitas merupakan pendidikan yang menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan global. Pendidikan merupakan proses *transfer of knowledge*, *transfer of attitude*, dan *transfer of skill* yang apabila dilakukan secara lengkap dan utuh dapat membentuk individu yang berkualitas.²⁵

Menurut Joseph M. Juran yang merupakan “Bapak Mutu” mengatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip pokok dasar tentang mutu sebagai tujuan utama, yaitu: (1) meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir, (2) perbaikan mutu merupakan proses berkesinambungan, (3) mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator, (4) pelatihan massal merupakan persyaratan mutu, dan (5) setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan.²⁶ Berbagai usaha peningkatan mutu yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat guna mencapai pendidikan yang berkualitas sampai saat ini belum terakses secara merata.

Sekolah yang memiliki kualitas yang baik masih terbatas terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Padahal dengan pendidikan yang berkualitas yang didapatkan oleh masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan yang baik pada hakekatnya adalah pendidikan yang berkualitas. Pendidikan

²⁵ M. Saroni, 2017, *Pendidikan Untuk Orang Miskin : Membuka Keran Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), hlm. 61

²⁶ Edward Sallis, *Total Quality in Education*, Manajemen Mutu Pendidikan, terj. Ahmad Ali Riyadi & Fahrussuzi (Yogyakarta: IRCiSOD, 2006), hlm. 7

harus memenuhi standar, metode dan kurikulum yang tepat, serta kualitas guru yang baik.²⁷ Pendidikan berkualitas atau “A Good Education” menurut Myron Tribus harus menyediakan komponen isi untuk para pembelajar, diantaranya mencakup *knowledge*, *know-how*, *wisdom* dan *character*.²⁸ Selain itu juga diimbangi dengan system, lingkungan, cara dan proses yang tepat dalam penyampaian komponen isi tersebut. Sejalan dengan Myron Tribus, menurut IHF pendidikan berkualitas juga bukan hanya sekedar sarana prasarana dan bukan hanya sekedar gedung sekolah melainkan yang terpenting dari pendidikan yang berkualitas adalah aspek isi.²⁹ Standar isi menjadi komponen penting yang harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Isi program kurikulum adalah sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.³⁰ Aspek isi mencakup nilai-nilai karakter, aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisiomotorik, dan seni.³¹

Proses menghasilkan SDM yang berkualitas tidak terlepas dari peran guru atau pengajar yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas gurunya, bukan besarnya dana pendidikan dan hebatnya fasilitas. Jika guru berkualitas

²⁷ S. B. Yudhoyono, 2007, Pendidikan yang Berkualitas. *Kabar Diknas*, hlm. 11

²⁸ Myron Tribus, 1994, Total Quality Management in Education: The theory and how to put it work, dalam G. Doherty, *Developing Quality System in Education*, (London: Routledge), hlm. 49

²⁹ Wawancara dengan Yuda Aviratri, 13 Mei 2019

³⁰ Esti Ismawati, 2012, *Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar*, (Yogyakarta:Penerbit Ombak), hlm. 10.

³¹ Pusat Kurikulum Balitbang, 2007, *Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini*, Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 4.

baik, maka akan baik pula kualitas pendidikannya.³² Dalam pendidikan yang dilaksanakan oleh *Indonesia Heritage Foundation* (IHF) yang fokusnya adalah pendidikan yang membentuk karakter peserta didik, isi kurikulum disesuaikan dengan tujuan dari IHF yaitu pembentukan karakter melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif untuk lingkungannya.³³

Membentuk pendidikan yang berkualitas membutuhkan beberapa komponen yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam jurnal M. Idrus dikatakan bahwa ada tiga hal yang harus dievaluasi agar hasilnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga butir tersebut adalah masukan, lingkungan sekolah dan keluarannya (out atau lulusan).³⁴ *Pertama*, komponen *input* yaitu menyangkut siswa; *kedua*, komponen proses yang menyangkut guru, bahan pelajaran, metode mengajar, sistem evaluasi, sarana penunjang, sistem administrasi dan sebagainya; *ketiga*, komponen *output* berkenaan dengan bagaimana keadaan pembelajar setelah mengalami proses pendidikan oleh guru. Setiap komponen

³² H. S. Sauri, 2016, Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu, *Universitas Pendidikan Indonesia*, hlm. 5

³³ Ratna Megawangi, 2004, *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*, (Depok: Indonesia Heritage Foundation), hlm.24.

³⁴ Muhammad Idrus, 2012, Mutu Pendidikan dan Pemerataan Pendidikan di Daerah, *Jurnal Psikopedagogia*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm. 4

tersebut harus terpenuhi dan berkesinambungan agar tercapainya pendidikan yang berkualitas.

I.6.2. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter berasal dari penggabungan dua kata yaitu kata pendidikan dan karakter. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, berlangsung sepanjang hayat, dan dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.³⁵ Menurut Sudirman N. pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang lainnya agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mantap.³⁶ Sedangkan karakter berasal dari Bahasa Latin *kharakter*, *kharassein*, *kharax*, Yunani *character* dan *charassein* yang berarti membuat tajam atau membuat dalam. Pendidikan karakter merupakan sekumpulan tata nilai yang tertanam atau terinternalisasi dalam jiwa seseorang yang membedakannya dengan orang lain seta menjadi dasar dan panduan bagi pemikiran, sikap dan perilakunya.

Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan nilai-nilai etis. Karakter yang baik memiliki tiga bagian yang saling

³⁵ Moh. Suardi, 2017, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Yogyakarta : Penerbit Parama Ilmu), hlm. 147

³⁶ Aisyah M. Ali, 2018, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya*, (Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group), hlm. 12

berhubungan yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan perilaku moral.³⁷ Jadi karakter yang baik adalah karakter yang diketahui, dirasakan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Ratna Megawangi, pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mengaplikasikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-harinya sehingga memberikan sumbangan positif kepada lingkungan sekitarnya.³⁸

Pendidikan karakter memiliki fungsi serta tujuan yang dikelompokkan secara prinsipiell, secara operasional dan secara institusional.³⁹

1. *Secara prinsipiell*, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, toleran, gotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
2. *Secara operasional*, pendidikan karakter bertujuan meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, seimbang, dan sesuai dengan standar kompetensi lulusan.

³⁷ Thomas Lickona, 2016, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter: bagaimana sekolah dapat memberikan pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggungjawab*, (Jakarta : Bumi Aksara), hlm. 82

³⁸ Ratna Megawangi, 2007, *Op.Cit*, hlm. 93

³⁹ Aisyah M. Ali, *Op.Cit.*, hlm. 13-14.

3. *Secara institusional*, pendidikan karakter bertujuan untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah. Bila pendidikan karakter dapat dilaksanakan dengan baik dan komprehensif di sekolah, maka akan tercipta warga sekolah yang menerapkan nilai-nilai karakter pada kehidupannya sehari-hari. Melalui pendidikan karakter juga diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter.

Sama halnya dengan pendidikan secara umum, pendidikan karakter dalam upaya pembentukan karakter juga merupakan usaha yang melibatkan semua pihak, baik orangtua, sekolah, lingkungan sekolah, maupun masyarakat luas. Karena tanpa adanya keterlibatan dari berbagai pihak tersebut, pembentukan karakter akan berjalan lama atau bahkan dapat terancam gagal. Terdapat tiga cara membentuk perilaku menjadi karakter, yaitu: *pertama, conditioning* atau pembiasaan; *kedua, insight* atau pengertian; *ketiga, modelling* atau keteladanan.⁴⁰

Pembentukan karakter yang baik, baiknya dilakukan sedari dini. Pendidikan karakter harus dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan.⁴¹ Hal ini dilakukan agar karakter terbentuk secara utuh dan karakter dapat terinternalisasi kedalam diri individu secara berkelanjutan. Seperti yang dikatakan oleh Thomas Lickona, keberhasilan jangka panjang akan pendidikan nilai-nilai yang baru

⁴⁰ Bimo Walgito, 2004, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM), hlm. 79

⁴¹ Aisyah M. Ali, *Op.Cit.*, hlm. 29

bergantung pada kekuatan di luar sekolah.⁴² Apabila kekuatan di luar sekolah tidak mendukung pengembangan karakter individu, maka pembentukan karakter tidak dapat berlangsung secara jangka panjang.

I.6.3. Kesamaan Hak dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lain⁴³. Pendidikan harus dilaksanakan hingga selesai karena pendidikan itu sendiri merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak dalam pekerjaan serta hak-hak lainnya yang akan mendorong keadaan seseorang menjadi lebih baik.

Menurut Pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat 1 menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan dalam Ayat ke 2 dikatakan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dalam hal ini berarti pendidikan merupakan suatu hal yang wajib untuk didapatkan oleh warga negara, khususnya warga negara usia sekolah. Setiap warga negara berarti tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, suku, agama, etnis, kedudukan sosial, dan status ekonomi memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Dalam ayat

⁴² Thomas Lickona, *Op.Cit.*, hlm.554

⁴³ Lukman Hakim, 2016, Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal EduTech*, Vol. 2, No.1, Maret 2016, hlm. 53-64.

kedua dikatakan pemerintah wajib membiayainya, berarti untuk masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi wajib dibantu pembiayaannya oleh pemerintah. Dalam hal pembiayaan ini masih menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat.

Menurut UNICEF, pemenuhan hak atas pendidikan meliputi tiga aspek, diantaranya adalah *the right of access to education, the rights to quality education, and respect for human rights in education*.⁴⁴ Dalam pernyataan ini menurut UNICEF hak atas pendidikan harus mencakup hak akses ke pendidikan, hak ke pendidikan yang berkualitas dan respek akan hak asasi manusia atas pendidikan. Akses ke pendidikan, kualitas pendidikan, dan penghormatan atas haknya dalam pendidikan harus di dapatkan oleh masyarakat karena ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan.

Berbicara tentang hak atas pendidikan, pemenuhan hak masyarakat terhadap pendidikan harus memiliki prinsip yang dipegang dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) PBB pada tahun 1999, terdapat 4 prinsip sebagai penjabaran hak atas pendidikan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah prinsip ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, dan adaptabilitas.⁴⁵

⁴⁴ UNICEF, 2007, *A Human Right-Based Approach to Education For All*, (New York : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), hlm. 27

⁴⁵ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, No.5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

1. **Ketersediaan Pendidikan**, maksudnya adalah ketersediaan pendidikan dalam bentuk kuantitas dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan pendidikan, seperti gedung sekolah, fasilitas sekolah, fasilitas sanitasi, air minum yang aman, pelatihan guru, kurikulum pendidikan dan sebagainya.
2. **Aksesibilitas atau Keterjangkauan**, yaitu setiap program pendidikan harus dapat dijangkau (diakses) oleh semua anak tanpa terkecuali.
3. **Akseptabilitas**, dimana bentuk dan substansi pendidikan termasuk kurikulum dan metode pengajaran harus sesuai dengan nilai-nilai budaya anak ataupun orangtua dan memenuhi standar minimum pendidikan yang ditetapkan pemerintah.
4. **Adaptabilitas**, dimana pendidikan harus bersiat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan perubahan sosial budaya masyarakat dan dapat merespon/menyikapi kebutuhan anak-anak terhadap perubahan sosial dan budaya.

Berdasarkan prinsip-prinsip dari hak atas pendidikan di atas, untuk mencapai hak atas pendidikan banyak komponen prinsip yang harus dipenuhi. Pendidikan harus tersedia untuk menunjang proses pendidikan. Selain ketersediaan juga pendidikan harus dapat diakses oleh masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Selain itu juga pendidikan harus memenuhi standar baik dalam metode dan kurikulumnya serta dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Pendidikan yang menjadi hak masyarakat juga harus fleksibel menyesuaikan perubahan sosial budaya masyarakat dan memenuhi kebutuhan peserta didik dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Prinsip-

prinsip tersebut harus dapat dipegang oleh para penyelenggara pendidikan agar setiap anak mendapatkan haknya akan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Peserta didik dari keluarga miskin yang mendapat subsidi pemerintah cenderung tidak mampu untuk menanggung kekurangan biaya sehingga mereka terpaksa akan mencari dan terkonsentrasi di sekolah-sekolah yang minimalis (miskin). Sementara itu peserta didik dari kelas menengah dan atas bebas memilih sekolah dengan sarana dan prasarana yang memadai. Besarnya anggaran tidak mempengaruhi mutu pendidikan⁴⁶. Padahal pada hakikatnya pendidikan yang berkualitas dan bermutu berhak untuk didapatkan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.

I.6.4. Kelas Sosial dan Pendidikan

Kehidupan sosial masyarakat terbagi atas kelas-kelas tertentu atau bertingkat secara hierarkis, ada masyarakat yang menduduki posisi atas (kelas atas), ada yang menduduki posisi menengah (kelas menengah) dan ada juga yang menduduki posisi bawah (kelas bawah).⁴⁷ Dalam pendidikan banyak problematika yang muncul akibat dari perbedaan kelas sosial ini, diantaranya adalah masalah dalam akses pendidikan. Individu dari kelas atas biasanya memasuki sekolah negeri atau swasta yang mahal dan

⁴⁶ Anita Lie, dkk, 2017, *Menjadi Sekolah Terbaik Praktik-Praktik Strategis dalam Pendidikan*, (Jakarta: Tanoto Foundation), hlm. 58

⁴⁷ Nanang Martono, 2010, *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah: Mengungkap Problematika Pendidikan dari Perspektif Sosiologi*, (Yogyakarta: Gava Media), hlm. 28

berkelas. Sedangkan individu dari kelas bawah lebih banyak meninggalkan sekolah lebih awal karena ketiadaan biaya.⁴⁸ Kelas sosial bawah digolongkan pada golongan pekerja tetap, pekerja tidak tetap, pengangguran, buruh musiman, dan orang yang bergantung pada tunjangan.⁴⁹ Golongan-golongan tersebut tidak jarang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak yang kualitasnya baik, karena pendapatannya tidak mencukupi untuk akses terhadap pendidikan berkualitas yang biayanya relative mahal.

Pendidikan adalah investasi diri untuk masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang baik, kita dapat menjadikannya sebagai bekal untuk mencapai kondisi kehidupan yang baik.⁵⁰ Dengan terlaksananya proses pendidikan maka individu memiliki keterampilan dan kompetensi yang berguna sebagai bekal kehidupannya dan pekerjaannya. Dalam hal pendidikan, masyarakat kelas atas lebih mudah dalam mendapatkan akses kepada pendidikan. Padahal, sama halnya dengan masyarakat kelas sosial atas, masyarakat kelas sosial bawah juga membutuhkan investasi diri untuk masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Pendidikan dapat menjadi saluran mobilitas kelas sosial. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih baik dalam masyarakat. Dengan mengakses pendidikan, status sosial dapat meningkat dan

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Triwijayati dan Pradipta, 2018, Kelas Sosial vs Pendapatan, *Jurnal Ekonomi*, Vol XXIII, No.02, Juli 2018, hlm. 148

⁵⁰ M .Saroni, *Op.Cit.*, hlm. 59

pendidikan juga merupakan saluran atau sarana mobilitas sosial.⁵¹ Menurut P.A. Sorokin terdapat sejumlah saluran mobilitas sosial, salah satu diantaranya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dianggap sebagai saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas dan merupakan suatu perangkat yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi.⁵² Lembaga pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya, sehingga kelak setiap peserta didik bisa mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi.

Kemudahan dalam akses pendidikan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi mobilitas sosial melalui saluran pendidikan.⁵³ Akses terhadap pendidikan dengan kualitas pendidikan yang baik mudah untuk didapatkan, maka akan mempermudah masyarakat dari kelas sosial tertentu untuk melakukan mobilitas sosial dengan bekal ilmu yang telah di dapatkan di sekolah. Namun, apabila akses terhadap pendidikan yang berkualitas sulit, masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang bagus. Hal ini membuat masyarakat dari kelas sosial tertentu sulit untuk mengubah status sosialnya dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui pendidikan.

⁵¹ H. Abdullah Idi, 2016, *Sosiologi Pendidikan (Individu, Masyarakat dan Pendidikan)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), hlm. 205

⁵² *Ibid.*, hlm.201

⁵³ *Ibid.*, hlm.202

Masyarakat miskin atau masyarakat kelas sosial bawah seringkali mendapatkan diskriminasi atas haknya terhadap pendidikan⁵⁴ Masyarakat yang berasal dari kelas sosial bawah atau masyarakat miskin seringkali diidentifikasi sebagai orang-orang bodoh yang tidak berpendidikan. Masyarakat miskin yang dianggap bodoh bukanlah orang bodoh jika diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan.⁵⁵ Kesempatan yang diperoleh masyarakat kelas bawah terhadap pendidikan berkurang bahkan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan proses pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang beruntung. Padahal masyarakat yang berada di kelas sosial bawah juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan selayaknya masyarakat kelas atas, yaitu pendidikan dengan kualitas yang baik.

Akses kelas bawah untuk mendapatkan pendidikan berkualitas masih sangat sulit karena terhambat faktor ekonomi. Belum banyak sekolah dengan kualitas baik yang terakses oleh masyarakat kelas bawah. Maka dari itu dibutuhkan peran dari masyarakat baik dalam bentuk peran perseorangan, kelompok, organisasi, perusahaan atau lainnya yang menjangkau pendidikan di masyarakat dari kelas sosial bawah. IHF menjadi salah satu organisasi yang menjangkau masyarakat kelas sosial bawah, IHF memberikan akses pendidikan dengan kualitas baik terhadap masyarakat kelas bawah.

⁵⁴ M. Saroni, *Op.Cit*, hlm. 59

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 61

Dengan akses terhadap pendidikan berkualitas yang diberikan IHF diharapkan dapat membuka jalan bagi masyarakat kelas bawah untuk melakukan mobilitas sosial.

I.6.5. Masyarakat dan Pendidikan

Pendidikan masyarakat merupakan model pendidikan yang mana segala hal yang terkait di dalamnya lebih banyak melibatkan peran masyarakat daripada keterlibatan atau campur tangan negara (pemerintah). Masyarakat mempunyai wewenang dan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraannya.⁵⁶ Pendidikan masyarakat ini merupakan suatu alternative dari pendidikan yang dilaksanakan oleh negara. Dengan pendidikan masyarakat ini diharapkan menjadi peluang untuk masyarakat dari berbagai lapisan mendapatkan kesempatan yang sama serta akses terhadap pendidikan.

Konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan usaha peningkatan rasa kesadaran, kepedulian, kepemilikan, keterlibatan, dan tanggung jawab masyarakat. Terdapat enam kondisi yang dapat menentukan terlaksananya konsep pendidikan berbasis masyarakat.⁵⁷

1. Masyarakat sendiri memiliki kepedulian dan kepekaan mengenai pendidikan.

⁵⁶ Defi Ranita Fitri, 2017, Tesis, *Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Tentang Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Utomo Surabaya)*, (Surabaya: Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel Surabaya), hlm. 17

⁵⁷ Winarno Surakhmat, 2000, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dalam Rangka Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*, *Kanwil Depdiknas*, hlm. 20

2. Masyarakat sendiri telah menyadari pentingnya pendidikan bagi kemajuan masyarakat.
3. Masyarakat sendiri telah merasa memiliki pendidikan sebagai potensi kemajuan mereka.
4. Masyarakat sendiri telah mampu menentukan tujuan-tujuan pendidikan yang relevan bagi mereka.
5. Masyarakat sendiri telah aktif berpartisipasi di dalam penyelenggaraan pendidikan.
6. Masyarakat sendiri yang menjadi pendukung pembiayaan dan pengadaan sarana pendidikan.

Menurut Epstein, terdapat berbagai jenis keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, bagaimana sekolah, orangtua atau keluarga dan masyarakat dapat bekerjasama secara produktif sehingga anak-anak berhasil di sekolah dan di kehidupannya kemudian, diantaranya adalah dengan:⁵⁸

1. *Parenting*, kegiatan ini untuk membangun lingkungan rumah yang mendukung anak belajar di sekolah.
2. *Communicating*, dalam kegiatan ini dirancang bentuk komunikasi antara orangtua dengan sekolah dan sekolah dengan orangtua yang efektif yang memungkinkan orangtua dapat belajar tentang program sekolah dan kemajuan anak-anaknya di sekolah. Dan untuk pihak sekolah terutama guru juga dapat mengerti dan belajar tentang bagaimana peserta didik tersebut di lingkungan rumah.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

3. *Volunteering*, kegiatan ini adalah kegiatan merekrut dan mengatur bantuan serta support orangtua terhadap sekolah.
4. *Learning at home*, kegiatan ini memungkinkan diberikannya ide kepada orangtua untuk ikut memberikan pembelajaran di rumah, seperti yang berkaitan dengan pekerjaan rumah, kegiatan, keputusan dan perencanaan terkait kurikulum.
5. *Decision making*, kegiatan ini memungkinkan orangtua turut serta mengambil peran dalam penetapan keputusan sekolah sebagai perwakilan orangtua.
6. *Collaborating with community*, kegiatan ini merupakan kegiatan mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya serta layanan dari komunitas untuk memperkuat program sekolah, praktik keluarga dan pembelajaran siswa.

Henevald an Craig mengidentifikasi lima kategori dukungan orangtua dan masyarakat dalam pendidikan, diantaranya : (1) anak-anak datang ke sekolah dan siap untuk belajar, (2) masyarakat memberikan dukungan finansial dan materi kepada sekolah, (3) terjalinnya komunikasi antara orangtua, masyarakat dan sekolah, (4) masyarakat memiliki peran penting dalam tata kelola sekolah, dan (5) anggota masyarakat dan orangtua membantu dengan instruksi. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat di dalam pendidikan akan terjadinya *maximizing limited resources, developing relevant curriculum and learning materials, identifying and addressing problems, creating and*

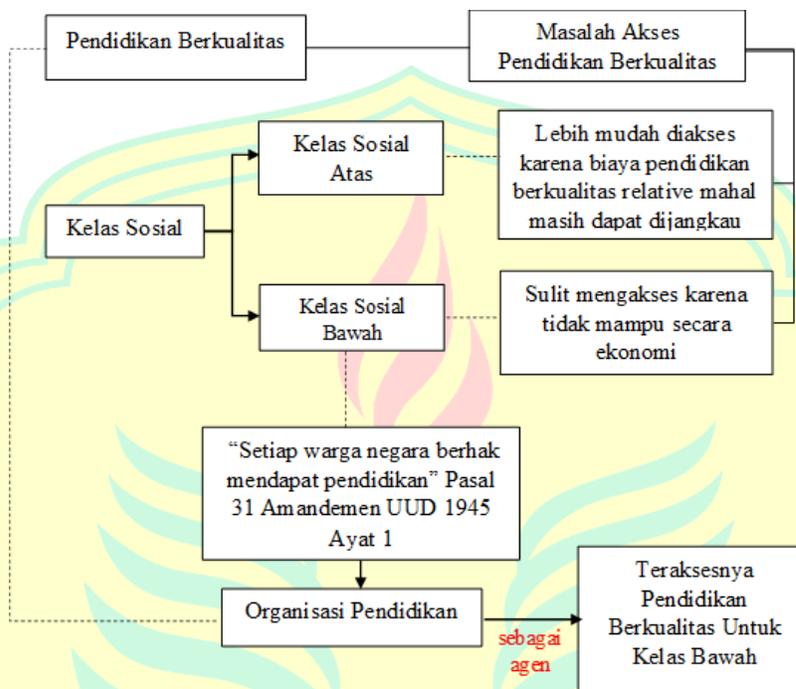
*nourishing community school partnership, realizing democracy, increasing accountability, ensuring sustainability, and improving home environment.*⁵⁹

I.6.6. Hubungan Antar Konsep

Berdasarkan kerangka konsep yang dipaparkan, secara sederhana peneliti membuat hubungan antara konsep yang digunakan dalam studi ini pada *Indonesia Heritage Foundation* dalam menerapkan pendidikan yang berkualitas pada kelas bawah. Kelas bawah didefinisikan sebagai individu yang menduduki posisi bawah dalam tingkatan hierarkis yang terdapat dalam masyarakat. Pendidikan merupakan hak setiap masyarakat, terutama anak-anak pada usia sekolah. Setiap warga negara tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, suku, agama, etnis, kedudukan sosial, dan status ekonomi memiliki hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Dalam pendidikan masyarakat kelas bawah seringkali mendapatkan ketidakadilan dalam akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas cenderung lebih terakses untuk masyarakat kelas atas karena biaya untuk mengakses pendidikan berkualitas relative mahal. Maka dari itu melalui *Indonesia Heritage Foundation* sebagai bentuk organisasi nirlaba yang hadir sebagai actor untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tidak hanya untuk kelas atas melainkan juga untuk kelas bawah melalui program-program yang dibentuknya.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 5-8

Skema I.1. Hubungan Antar Konsep



(Sumber : Diolah oleh Penulis, 2019)

I.7. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menekankan pada pencarian data secara mendetail dari suatu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha membangun sebuah realitas sosial, dimana peneliti terlibat dan membangun sebuah realitas sosial, dimana peneliti terlibat dan memfokuskan diri untuk melihat interaksi maupun proses yang terjadi pada fenomena maupun subjek yang diteliti. Penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para

partisipasi, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data⁶⁰. Penelitian ini merupakan strategi penelitian deskriptif berbentuk studi kasus. Penelitian dengan strategi penelitian studi kasus merupakan rancangan penelitian dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih.⁶¹

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode studi kasus yang membahas masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, kegiatan dan proses yang berlangsung. Dilihat dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan lebih mendalam mengenai upaya pemerataan pendidikan berkualitas yang dilakukan oleh *Indonesia Heritage Foundation* untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat baik ekonomi kelas menengah atas maupun kelas bawah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mengetahui implikasi dari pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh *Indonesia Heritage Foundation* ini terhadap masyarakat. Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini diharapkan didapatkan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan serta fakta yang relevan.

⁶⁰ John W. Creswell, 2016, *Research Design Edisi Keempat (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), hlm. 5

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 19

I.7.1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan kunci yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung dan rutin di dalam pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh IHF.

Tabel I.2. Karakteristik Informan

NO	NAMA	POSISI	PERAN DALAM PENELITIAN
1.	Edianna Putri Mayangsari	Wakil Direktur Eksternal IHF dan Trainer Pelatihan Guru	Memberikan informasi gambaran mengenai berbagai Program yang dilaksanakan oleh IHF dan juga memberikan gambaran mengenai mekanisme pelatihan guru.
2.	Yudha Aviratri	Penanggungjawab Semai Benih Bangsa (SBB) dan Monitoring SBB	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan program SBB yang dilaksanakan oleh IHF
3.	Nur Aisyah (Bu Enung)	Wakil Kepala Sekolah dan Pendidik SBB Tapos	Memberikan informasi mengenai sejarah awal pembentukan sekolah dan bagaimana bisa menjadi sekolah SBB, dan pelaksanaan pendidikan di sekolah.
4.	Siti Maisaroh	Kepala Sekolah dan Pendidik SBB Kebayunan	Memberikan informasi mengenai sejarah awal pembentukan sekolah dan bagaimana bisa menjadi sekolah SBB, dan pelaksanaan pendidikan di sekolah
5.	Yuyun Wahyuni	Pengajar SBB Tapos	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pendidikan di SBB Tapos
6.	Sutantri	Pengajar SBB Kebayunan	Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pendidikan di SBB Tapos

(Sumber : Diolah oleh Penulis, 2019)

I.7.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia Heritage Foundation (IHF) yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 31 No. 46, Cimanggis, Depok. Alasan mengapa penulis mengambil lokasi ini untuk dijadikan lokasi penelitian adalah karena di lokasi

tersebut merupakan lokasi dari lembaga organisasi yang memiliki program-program yang menunjang perkembangan pendidikan berkualitas dalam bentuk pengembangan pendidikan karakter. Dalam program yang dibentuk didalam IHF ini selain sekolah karakter dengan biaya yang lumayan mahal, ada juga program Semai Benih Bangsa (SBB) yang memberikan pendidikan untuk anak kurang mampu, serta ada juga program pelatihan guru untuk terbentuknya guru professional guna menunjang pendidikan berkualitas. Dengan hal tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana IHF dapat memberikan pendidikan berkualitas melalui program-program bentukannya tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret sampai Juni 2019.

I.7.3. Peran Peneliti

Peran Peneliti dalam penelitian Kualitatif adalah untuk mengumpulkan data-data yang telah ada di dalam instrument untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai personal dan asumsi-asumsi yang ditemui di lapangan dan akan memengaruhi hasil akhir dari penelitian.⁶² Dalam melakukan penelitian terhadap *Indonesia Heritage Foundation* (IHF) ini, peran peneliti adalah sebagai orang di luar organisasi ini yang mengumpulkan data dan mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh *Indonesia Heritage Foundation*. Dalam hal ini peneliti berusaha mencari informasi mengenai segala bentuk program yang dilakukan oleh IHF dalam mengupayakan

⁶² *Ibid.*, hlm. 59

pendidikan berkualitas untuk masyarakat. Peneliti juga harus tetap membatasi diri agar penelitian yang dilakukan tidak subjektif melainkan tetap bersifat objektif.

I.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya:

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang beragam terkait dengan suatu informasi. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara ini, sebelum peneliti melakukan turun lapangan, peneliti membuat pedoman wawancara terlebih dahulu. Pedoman wawancara berisikan beberapa pertanyaan terkait dengan hal-hal yang ingin diketahui dan digali lebih mendalam guna memperoleh data-data terkait yang dapat memperkuat penelitian ini. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan wawancara mendalam yang bersifat terbuka sehingga peneliti dapat memperoleh informasi secara lisan yang dapat menjelaskan atau menjawab pertanyaan penelitian yang diberikan. Wawancara mendalam juga akan memberikan keleluasaan informan untuk memberikan jawaban tanpa perasaan tertekan.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati segala bentuk perilaku, aktivitas, setiap individu maupun

objek yang akan peneliti amati secara langsung pada saat penelitian dilaksanakan. Dengan dilakukannya kegiatan observasi, peneliti yang didampingi oleh partisipan dapat mendapatkan informasi secara langsung yang mungkin tidak terungkap melalui proses wawancara. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan *Indonesia Heritage Foundation* (IHF) di Depok terkait dengan kegiatan pembentukan pendidikan berkualitas yang dilaksanakannya, yaitu terutama pada aktivitas program Semai Benih Bangsa (SBB). Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan IHF dalam sekolah SBB, sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana pendidikan berkualitas berbasis karakter yang di terapkan oleh IHF.

3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya. Data melalui dokumentasi ini diambil oleh penulis dalam segala macam bentuk daya yang mendukung, seperti artikel, gambar, hasil rekaman, memo dan *fieldnote*. Pengambilan data berupa hasil dokumentasi tersebut adalah guna menjadi data pendukung bagi laporan penelitian selain dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dengan para pengurus dari *Indonesia Heritage Foundation* (IHF).

Sedangkan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah melalui studi pustaka yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis, seperti halnya

melalui jurnal, tesis, disertasi, buku-buku serta studi pustaka lainnya yang mendukung. Data sekunder juga digunakan guna mendukung penelitian penulis, data sekunder yang dimaksudkan adalah berupa berkas-berkas yang dimiliki oleh *Indonesia Heritage Foundation* (IHF). Dokumentasi lainnya berupa foto-foto kegiatan yang dilakukan oleh *Indonesia Heritage Foundation* (IHF) juga ada yang penulis dapatkan melalui website dan sosial media resmi mereka. Selain itu juga dari website lib.ui.ac.id, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Universitas Indonesia (UI), serta Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang mendukung pencarian jurnal, tesis, disertasi serta buku yang menunjang penelitian ini.

I.7.5. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya yang penting untuk dilakukan setelah mengumpulkan dan memproses data dalam proses penelitian adalah analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis data kualitatif yang diperkaya oleh studi literature yang ekstensif. Data yang telah di peroleh melalui observasi yang telah dimuat dalam catatan lapangan maupun dari dokumentasi yang ada, kemudian data yang diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam hingga tahap selanjutnya akan di analisis oleh penulis dengan cara interpretasi ke dalam suatu abstraksi dan kerangka pemikiran tertentu. Hasil observasi dan wawancara merupakan suatu data primer yang akan dianalisa oleh data sekunder dari konsep-konsep yang sesuai dan berasal dari buku.

I.7.6. Triangulasi Data

Triangulasi data pada dasarnya merupakan salah satu strategi atau cara yang tepat dalam membuktikan keabsahan sebuah penelitian. Perlu ada jaminan apa yang dihasilkan pada saat melakukan penelitian merupakan suatu interpretasi yang tepat dalam artian bahwa informasi yang di dapatkan adalah sebuah fakta terhadap suatu fenomena atau gejala. Mathinson menjelaskan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.⁶³

Maksud dari dilakukannya triangulasi data adalah peneliti dapat menguji data yang diperoleh dari satu sumber dan dibuktikan serta dikomparasi dengan data dari sumber yang berbeda. Hasil data yang diperoleh akan sampai pada kemungkinan apakah data tersebut sesuai atau tidak sesuai, konsisten atau tidak konsisten dengan realita yang terjadi di lapangan. Peneliti melakukan triangulasi data pada kepada pihak sekolah yang menjadi objek dari penerapan pendidikan berkualitas di daerah masyarakat miskin yaitu pengelola sekolah SBB serta pengajar yang mengikuti pelatihan guru yang dilakukan oleh *Indonesia Heritage Foundation* (IHF). Selain itu peneliti juga melakukan triangulasi data kepada orangtua peserta didik yang bersekolah

⁶³ *Ibid.*, hlm. 241.

di SBB untuk mengetahui sejauh mana pendidikan berkualitas yang dilaksanakan dalam SBB berdampak pada peserta didik dan lingkungannya.

Tabel I.3. Triangulasi Data

NO	NAMA	POSISI	PERAN DALAM PENELITIAN
1.	Bu Rina Fitriana	Orangtua Murid SBB Tapos	Memberikan informasi mengenai implikasi dari keberadaan SBB Tapos pada peserta didik

(Sumber : Diolah oleh Penulis, 2019)

I.8. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan di dalam sebuah penelitian merupakan sebuah pengantar yang digunakan untuk menjelaskan alur pemikiran yang mendasari suatu penulisan dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar mempermudah penulis serta pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini secara menyeluruh. Sistematika penelitian terdiri atas tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, serta penutup. Sebagai gambaran dari isi penelitian ini secara keseluruhan, penulisannya dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

Bab I : Dalam bab 1 yang merupakan bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Dalam bagian latar belakang penelitian, penulis menggambarkan mengenai masalah yang akan dibahas. Selanjutnya permasalahan penelitian memberikan Batasan masalah yang akan menjadi fokus dari pembahasan dalam penelitian yang dituliskan dalam beberapa pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam bab-bab berikutnya. Dalam tujuan dan manfaat penelitian dijelaskan maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dalam

kerangka konseptual, penulis mencabarkan secara rinci konsep serta teori yang akan digunakan dalam membahas masalah dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penenelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Kemudian yang terakhir adalah sistematika penelitian, penulis memberikan gambaran mengenai apa saja yang akan dibahas secara keseluruhan dalam setiap bab yang akan dibuat dalam penelitian ini.

Bab II : Dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum mengenai organisasi *Indonesia Heritage Foundation* (IHF). Kemudian dalam bab ini akan dijelaskan mengenai profil, visi-misi dan lain sebagainya yang akan dibentuk dalam subbab-subbab seperti struktur organisasi, keanggotaan, program bentukan, jangkauan program, mitra, sumber dana, serta subbab lainnya yang berkaitan dengan gambaran IHF.

Bab III : Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil temuan yang ada dalam organisasi dan menguraikan secara rinci mengenai pendidikan berkualitas untuk kelas bawah yang dilaksanakan oleh *Indonesia Heritage Foundation*.

Bab IV : Dalam bab ini penulis melakukan analisis mengenai pendidikan berkualitas untuk kelas bawah yang dilakukan oleh *Indonesia Heritage Foundation*.

Bab V : Dalam bab lima yang merupakan bab penutup ini berisikan kesimpulan serta saran yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan akan diberikan secara rinci dan kemudian

peneliti akan memberikan saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan. Penulisan kesimpulan serta saran ini dilakukan guna mempermudah pembaca dalam memahami inti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

